

**KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN
TELEVISI ANALOG MENUJU TELEVISI DIGITAL
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

Chairunisa

2026031011



**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN
TELEVISI ANALOG MENUJU TELEVISI DIGITAL
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**Chairunisa
2026031011**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Pada

Jurusan Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Peralihan Televisi Analog Menuju Digital Di Provinsi Lampung

Oleh:

Chairunisa

Kebijakan peralihan televisi analog menuju digital dibentuk untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan frekuensi yang dimiliki. Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas tidak hanya sebagai efisiensi frekuensi migrasi televisi analog menuju digital memiliki tujuan menjadikan kualitas siaran lebih jernih dan menguntungkan pada tahapan stabilitas dan juga tahan terhadap gangguan. Akan tetapi dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi antara pelaksana dan publik yang mengakibatkan ketidakjelasan informasi dari berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana implementasi kebijakan kepada publik pada program peralihan televisi analog menuju digital di provinsi Lampung. Adapun fokus penelitian ini yaitu proses komunikasi yang dilakukan pelaksana dan implementasi peralihan televisi analog menuju digital di provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif pada fenomenologi dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan kepada penyelenggara daerah mengalami ketidakjelasan informasi dikarenakan proses komunikasi yang tidak secara berkala dan tanpa perencanaan yang tidak baik. Selain itu penunjang dari peralihan kebijakan ini yakni *set top box* (STB) yang merupakan alat penunjang program yang juga dalam pembagiannya belum merata sehingga pelaksanaan peralihan televisi analog ke digital di provinsi Lampung mengalami hambatan. Komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan belum merata kepada para penyelenggara daerah khususnya para penyewa mux daerah dan juga pemerintah daerah di provinsi Lampung beberapa kendala juga diantaranya berkaitan informasi bantuan STB (*Set Top Box*) yang akan diberikan kepada rumah tangga dalam kategori miskin ekstrem. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlu adanya peningkatan kesadaran yang mempengaruhi sikap agar kejelasan migrasi menemukan solusi dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antara pelaksana dan penyelenggara kebijakan baik pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Implementasi, ASO, Televisi Digital

ABSTRACT

Communication In The Implementation Of Analog To Digital Television Transition Policy In Lampung Province

**By:
Chairunisa**

The policy of switching analog television to digital was formed to streamline and optimize the frequencies owned. Frequency is a limited natural resource, not only as frequency efficiency, the migration of analog television to digital has the aim of making broadcast quality clearer and more profitable at the stage of stability and also resistant to interference. However, in optimizing the implementation of policies in this study, problems related to communication between implementers and the public were found which resulted in unclear information from various aspects. This study aims to analyze how policy communication carried out by policy implementation implementers to the public in the analog television transition program to digital in Lampung province. The focus of this research is the communication process carried out by the implementation and implementation of the transition of analog television to digital in Lampung province. The research method used is a qualitative descriptive approach to phenomenology with informant determination techniques using purposive sampling. The results of the study show that communication made by policy implementers to regional administrators experiences unclear information due to the communication process that is not regular and without good planning. In addition, the support of this policy shift is the set top box (STB) which is a program support tool which is also unevenly distributed so that the implementation of the transition from analog to digital television in Lampung province has experienced obstacles. Communication in the form of socialization carried out by policy implementers has not been evenly distributed to regional organizers, especially regional mux tenants and also local governments in Lampung province, several obstacles are also related to information on STB (Set Top Box) assistance that will be given to households in the extreme poor category. The advice that can be given by researchers is the need for increased awareness that affects attitudes so that migration clarity to find solutions in carrying out cooperation requires intensive communication between implementers and policy organizers both cent

Keywords: Policy Communication, Implementation, ASO, Digital Television

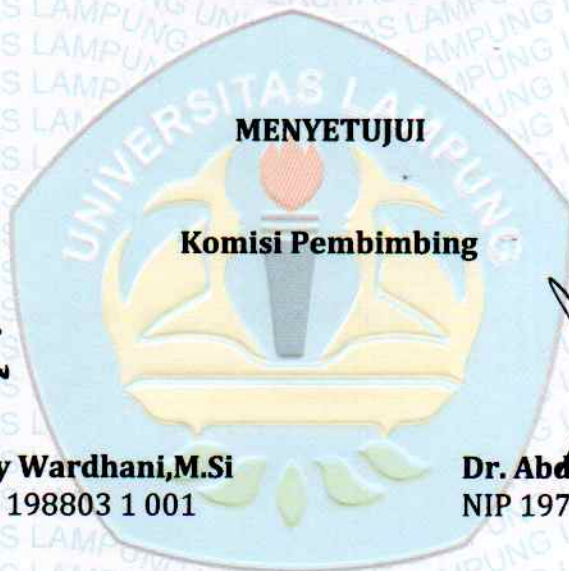
Judul Tesis : **KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN TELEVISI ANALOG MENUJU TELEVISI DIGITAL DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Chairunisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2026031011**

Bagian : **Komunikasi Politik Dan Media**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si
NIP 19620716 198803 1 001


Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si
NIP 19721111 199903 1 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**


Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si
NIP 19620716 198803 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si



Sekretaris/Anggota : Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si



Penguji Utama : Dr. Nanang Trenggono, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001.

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Peralihan Televisi Analog Menuju Televisi Digital Di Provinsi Lampung**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Chairunisa
NPM 2026031011

RIWAYAT HIDUP



Tekhbik di lambung dunia lindu way jemahat imbun mahayu, Kalianda 21 Februari 1997 tepatnya pada hari jumat penulis dilahirkan dan diberi nama Chairunisa. sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, kedua adiknya semua laki-laki. Putri pertama dari pasangan Tri Yahman, S.H dan Komariah AM,d. lahir dengan kembar air dan terlilit tali pusar yang menjadi tanda bahwa penulis memiliki keistimewaan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kejutan dan yang daya tarik melalui sikap, tutur kata dan juga cara berpakaian. Terlahir dengan shio kerbau api yang memiliki karakter cenderung mudah bosan namun karakter paling kuat ada pada kegigihan, penuh semangat menghadapi hidup, dan bisa menjelajah kehidupan dari petualangan yang satu ke petualangan lainnya.

Lapah sekula pekhmulaan adu goh putit mukhai tegi khani, mengawali hari-hari-hari menyenangkan dengan mengenal huruf dan bermain di TK Aisyah Kalianda, sejak kecil penulis sangat suka mendengarkan radio bahkan aktif menjadi pendengar yang setiap harinya selalu kirim salam lewat radio serta memiliki cita-cita menjadi penyiar radio, hal ini juga diimbangi dengan seringnya penulis menjadi sahabat pena kala masih di TK pada salah satu media cetak populer di Lampung yakni “Lampung Post” selain itu penulis sangat suka bercerita tentang banyak hal mungkin ini yang menjadi awal dari kegemaran yang mengantarkan penulis menyukai dunia komunikasi, media dan musik.

Attak sussionsung minak ngebedak sekula gegoh ulun khamik, Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 2 Kalianda, menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah ke kalianda sekitar 8,9 KM dengan diantaranya setiap hari oleh minak atau panggilan ayah dalam bahasa lampung khusus daerah kuripan lampung selatan Buay Aji merupakan perjalanan jauh yang terasa dekat. Penulis juga memiliki pengalaman mengikuti pramuka dan perlombaan baris berbaris dan mendapatkan juara kedua pada kelas 5 dan 6 SD.

Kattu tuah haga gugokh mak dok baka ni, SMP Negeri 1 Kalianda menjadi tempat belajar selanjutnya. Penulis mengikuti ekstrakurikuler KIR (Karya Ilmiah Remaja) penulis belajar melakukan pengamatan karya ilmiah di beberapa lokasi outdoor di Lampung selatan salah satunya gunung Rajabasa. dilatih untuk belajar baik disekolah maupun diluar sekolah kesibukkan itu dipilhkan kedua orang tua dengan tujuan kelak bekal yang dimiliki cukup dan

Mulai ku tinggalan pekon, untuk pertama kalinya meninggalkan kampung halaman untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Gadingrejo kabupaten Pringsewu awal menjadi anak kos dan aktif mengikuti banyak ekstrakurikuler salah satunya dengan menjadi penyiar radio sekolah, menjadi pimpinan redaksi majalah buletin sekolah, mengikuti olimpiade biologi, mengikuti olimpiade PKN dan mencetak sejarah pertama juara LCC PKN tingkat provinsi di SMA Negeri 1 Gadingrejo, aktif menjadi sutradara pada ajang pentas seni dan memenangkan juara 3 lomba gamelan Jawa antar kelas.

Lawok sai bekhak haga kulewati ku cakak i gunung si khanggal, Yogyakarta adalah kota dengan penuh kenangan mendaftarkan diri melalui jalur tes di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dibawah Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dan memilih jurusan Komunikasi Informasi Publik pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Semasa berkuliah penulis aktif mengikuti radio kampus yakni MMTC radio sebagai produser dan juga penyiar. Menjadi anggota dari keluarga besar mahasiswa Kalianda (KMPK LS) di Yogyakarta sebagai Humas dan kembali menjabat posisi yang sama sebagai Humas di Himpunan Mahasiswa Lampung (Himpala) dan memenangkan juara kedua sebagai Muli Mekhanai Lampung-Yogyakarta. Pendengar setia lagu-lagu Sheila on 7 ini pernah mencoba berjualan Donat untuk mengisi perut dirantau kurang lebih 4 semester. Melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Pariwisata Kota Yogya membuat penulis memiliki pengalaman dibidang event khususnya acara malam yakni pentas seni Malioboro.

Sakheh layau hatiku pulipang lain sungi, setelah lulus dari STMM Yogyakarta penulis memutuskan untuk kembali pulang ke Lampung karena pada saat itu kondisi Lampung selatan terdampak bencana Tsunami. Penulis untuk pertama kalinya mengikuti relawan kebencanaan selama 3 bulan dilanjutkan dengan

menjadi tenaga fasilitator pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lampung selatan sampai akhirnya penulis bekerja di salah satu media lokal milik pemerintah daerah yakni Radio Dimensi Baru sebagai bidang program, produser dan juga penyiar. Mengenal program pemerintahan lebih dalam, melakukan talkshow dari bupati, perwakilan kementerian sampai dengan kepala desa dan juga para pedagang UMKM sudah menjadi kegiatan sehari-hari penulis. Keinginan untuk kembali ke yogyakarta masih menggebu-gebu karena penulis memiliki cita-cita untuk melanjutkan sekolah di Universitas Gajah Mada, namun ketetapanNya bukan di tempat tersebut akhirnya penulis kembali ke lampung dan membawa seluruh harapan agar kelak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang master di tempat yang lain. Karena tak harus ditempat yang sama namun ilmu harus terus diperjuangkan.

Kacak handak balung nukan ki handak mata, Setelah perjalanan panjang gagal bangkit lagi, jatuh berdiri lagi, setiap perjuangan dirasakan oleh penulis hari demi hari, bagai peribahasa tajam pisau karena diasah mengantarkan penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan pascasarjana pada tahun 2020 di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2023 di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan menyandang gelar magister ilmu komunikasi.

Peran semesta adalah wujud dari sebuah perjalanan dalam perjuangan, percayalah jatuhnya, sakitnya, nestapa yang dirasa akan membuka pintu-pintu lain yang menjadi doa yang selalu dikumandangkan dan menggema menjadi sebuah kenyataan. Tak perlu ragu karena waktu kadang tak berpihak, tempat kadang tak menetap tapi yakinlah tempat dan waktu akan datang bersama pada saat kita berserah dan menjadikan segala urusan di dunia ini hanya kepada Tuhan dan diiringi restu keluarga. Perjalanan ini adalah tercapainya doa pada awal semester 2 sewaktu di yogya semoga gelar magister ilmu komunikasi ini menjadi bekal baik dan bermanfaat untuk yang membutuhkan.

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan ridho Allah SWT, berkah dan karunia dari-Nya, Dengan kesadaran akan keterbatasan ilmu Saya persembahkan Tesis ini kepada :

- Kedua orang tua, Minak Tri Yahman, S.H dan Ibunda Komariah, A.Md Terima kasih banyak atas segala kerja keras dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang, dan restu dari setiap keputusan yang penulis pilih.
- Kedua adik, M. Hafis Reformasi, S.H dan Fahri Fatur Rahman Terima kasih banyak atas dukungan, doa, semangat, waktu dan tentunya selalu menemani selama menyelesaikan tesis baik pagi siang ataupun malam.
- Keluarga Besar Buay Aji Keratuan Darah Putih Pangeran Warga Kuripan Lampung Selatan
- Keluarga Besar Hi.M.Kasim Raden Saleh dan Keluarga Besar Hi.Marwan Sulaiman
- Dosen pembimbing dan penguji, Bapak Dr.Andy Corry Wardhani, M.Si, Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si dan Penguji Utama Bapak Dr. Nanang Trenggono Terima kasih atas segala bantuan, baik itu dalam bentuk masukan, saran, kritik, dan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini.
- Almamater tempat belajar dan menggali ilmu, Universitas Lampung.
- Radio Dimensi Baru LPPL Lampung Selatan, tempat implementasi ilmu dan pembentuk karakter.
- Teman Masa Depan Agung Rahmat Pramana

MOTTO

Orang Yang Arif Itu Dermawan. Bagaimana Ia Tidak Dermawan, Karena Harta Benda Baginya Bukan Kekayaan. Kekayaan Sejati Ialah Cinta Akan Kebenaran.
(Ibnu Sina)

*Tukok lemong tukok ni batin khatu
najin di lawok akhong
kuselom siapi niku*

(Khatu Batin Khatu , Raden Imba Kesuma Ratu I)

"Menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman, tetapi itu akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat."
(John Lennon)

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul, **“Komunikasi Dalam Kebijakan Implementasi Peralihan Televisi Analog Menuju Televisi Digital Di Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Teriring juga shalawat serta salam saya haturkan kepada Pemimpin dari segala Pemimpin, Panutan dari segala Panutan, Nabi Muhammad SAW, yang semoga hingga akhir zaman kita tetap menjadi umatnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak berikut karena telah memberikan bimbingan, doa, partisipasi, bantuan moril maupun materil dalam upaya saya mendapatkan gelar Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Fisip Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si. selaku selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Komunikasi dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si. sebagai Pembimbing pendamping atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Seluruh Dosen khususnya dosen program studi magister ilmu komunikasi dan seluruh Staf Administrasi Pascasarjana Ilmu Komunikasi untuk bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu selama saya menjadi Mahasiswa di Kampus Hijau ini.

7. Kawan-kawanku seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2020 seluruhnya dan khususnya untuk Reni Susanti Lumbu, Dwi Ayu, Tiyas, Nurhasanah.
8. Kepada pemilik NPM 43181340219172 menjadi pengingat dan tempat bertukar pendapat dikala dalam perjalanan penelitian ini terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan dan menjadi penenang untuk setiap kondisi yang sulit untuk diperkirakan.
9. Pimpinan dan kawan-kawan Kru Radio Dimensi Baru LPPL Lampung Selatan Viska, pina, Viki, Edi, Siska, Dan Dewi yang telah ikut membantu menggantikan siaran dikala harus melaksanakan penelitian ini serta merubah pesimisme menjadi sebuah optimisme .
10. Riesa Sativa Ilma dan Nabila Qonita untuk doa dan dukungan selama mengarungi perkuliahan pascasarjana ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis

CHAIRUNISA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	19
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Komunikasi Organisasi.....	15
2.3. Implementasi Kebijakan	20
2.3.1. Konsep Komunikasi.....	22
2.3.2. Sumberdaya.....	24
2.3.3. Sikap	25
2.3.4. Struktur Birokrasi	26
2.4. Komunikasi Kebijakan	27
2.4.1. Penyaluran Komunikasi	30
2.4.2. Kejelasan Komunikasi	31
2.4.3. Konsistensi Komunikasi.....	32
2.5. Digitalisasi	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Paradigma Penelitian	35
3.2. Metode Penelitian.....	37
3.3. Unit Analisis.....	41

3.4.	Subjek dan Objek Penelitian	42
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6.	Keabsahan Data.....	44
3.7.	Teknis Analisis Data.....	45
BAB IV		47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1.	Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	47
4.2.	Profil Informan.....	52
4.2.1.	Informan Pertama	52
4.2.1.	Informan Kedua.....	53
4.2.2.	Informan Ketiga	54
4.2.3.	Informan Keempat.....	55
4.2.4.	Informan Kelima	56
4.3.	Hasil.....	57
4.3.1.	Sejarah Migrasi Televisi Analog Ke Digital	57
4.3.2.	Komunikasi	78
4.3.3.	Sumberdaya.....	81
4.3.4.	Sikap.....	91
4.3.5.	Struktur Birokrasi.....	95
4.3.6.	Komunikasi Kebijakan.....	106
4.4.1	Pembahasan Implementasi Kebijakan	148
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		157
5.1.	Kesimpulan	157
5.2.	Saran.....	158
5.1.1	Saran Secara Umum	159
5.1.2	Saran Secara Akademik	160
DAFTAR PUSTAKA.....		161
PERTANYAAN DAN PANDUAN WAWANCARA.....		168

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Stasiun TV di Lampung.....	5
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Skema Perjalanan Migrasi Televisi analog ke digital.....	66
Tabel 4.2 Data Peserta Seleksi Multiplexing dan sesuai dengan daerah.....	71
Tabel 4.3 Distribusi Set Top Box di Provinsi Lampung	74
Tabel 4.4 Daftar Jenis Dan Harga Set Top Box Rekomendasi	77
Tabel 4.5 Data Distribusi Set Top Box Lampung 1.....	84
Tabel 4.6 Pendistribusian STB oleh pemerintah	88
Tabel 4.7 Reduksi Data komunikasi kebijakan.	98
Tabel 4.8 Reduksi Data komunikasi kebijakan.	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Publik George C. Edward III	18
Gambar 4. 1 Informan Pertama Sumber : Olahan Peneliti 2022	52
Gambar 4. 2 Informan Kedua Sumber : Olahan Peneliti 2022.....	53
Gambar 4. 3 Informan Ketiga Sumber : Olahan Peneliti 2022	54
Gambar 4. 4 Informan Keempat Sumber : Olahan Peneliti 2022.....	55
Gambar 4. 5 Informan Kelima Sumber : Olahan Peneliti 2022	56
Gambar 4. 6 Roadmap 2009 – 2020 Sumber : Kominfo.go.id.....	59
Gambar 4. 7 Urgensi Digitalisasi Penyiaran TV Sumber : Kominfo.go.id.....	61
Gambar 4. 8 Digital Dividen 700 MHz Sumber : Kominfo.go.id	62
Gambar 4. 9 Linimasa dan Tahapan ASO Sumber : Kominfo.go.id.....	65
Gambar 4. 10 Gambar Set Top Box Sumber : Kominfo.go.id	72
Gambar 4. 11 Total Sebaran ASO1, ASO2 , ASO3	73
Gambar 4. 12 Bentuk website cek bantuan STB Sumber : Kominfo.go.id.....	75
Gambar 4. 13 Mekanisme Distribusi STB Untuk Rumah Tangga Miskin	75
Gambar 4. 14 Berita seputar Set Top Box Sumber : dpr.go.id.....	85
Gambar 4. 15 Sebagai Narasumber Analog Switch Of	108
Gambar 4. 16 Konten Diskominfo Lampung Terkait STB.....	109
Gambar 4. 17 Konten Diskominfo Lampung Terkait ASO S	110
Gambar 4. 18 Sosialisasi ASO dan Pembagian Set Top Box	111
Gambar 4. 19 Sosialisasi ASO dan Pembagian Set Top Box	111
Gambar 4. 20 Sosialisasi Pembagian Set Top Box	112
Gambar 4. 21 Sosialisasi Pembagian Set Top Box Oleh	118
Gambar 4. 22 Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi	123
Gambar 4. 23 Rakor dengan kepala organisasi & Perangkat Daerah.....	123
Gambar 4. 24 Sosialisasi ASO di TVRI	124
Gambar 4. 25 Iklan layanan Masyarakat TVRI	125
Gambar 4. 26 Program Halo Lampung Radar TV Digital	127
Gambar 4. 27 Gambar 4.25 Konten Instagram ASO.....	128
Gambar 4. 28 Gambar 4.26 Menjadi Narsum Pada Sosialisasi ASO	128
Gambar 4. 29 Gambar 4.27 TVRI melakukan Sosialisasi	131
Gambar 4. 30 Sosialisasi dan Bimtek melalui zoom	133
Gambar 4. 31 Model Rotasi.....	156

DAFTAR ISTILAH

- ASO : Analog Switch OFF merupakan program pemberhentian siaran analog bakal mendukung percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia
- Multipleksing (Mux) : Pengelompokan layanan siaran dalam bentuk paket data yang disisipkan untuk disiarkan melalui jaringan multipleks atau pemancar yang punya kelompok layanan saluran TV tersebut.
- STB : Set top box ini adalah alat yang bisa mengkonversi jenis sinyal digital menjadi bentuk gambar dan juga suara
- DVBT-1 : Digital Video Broadcasting - Terrestrial, disingkat DVB-T) yang memiliki memiliki bandwidth 31 Mbit per detik
- DVBT-2 : Digital Video Broadcasting - Terrestrial, disingkat DVB-T) yang memiliki memiliki bandwidth 45 Mbit per detik
- LPPL : Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi menjadi fundamental dalam segala aspek kehidupan manusia yang senantiasa memiliki hubungan baik antar pribadi maupun publik. adanya sebuah kemajuan dan perkembangan zaman menjadikan komunikasi sebagai sebagai alat masyarakat untuk mengetahui perkembangan informasi. Pada era informasi saat ini setiap elemen masyarakat mengikuti bagaimana teknologi bekerja dan bermanfaat selain mudah menjangkau ke segala sektor, sinergitas yang dikombinasikan antara komunikasi dan teknologi menjadi sebuah kesatuan. Teknologi yang memiliki dampak besar terhadap sektor komunikasi dan informatika membuat semua elemen bergantung pada solusi teknologi digital.

Digitalisasi menjadi bagian dari pengertian tentang masa depan dan juga tentang kecepatan yang akan diberikan yang berkaitan erat tentang perkembangan teknologi komunikasi serta informasi dan juga media. Media sesungguhnya merupakan bagian dari ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pandangan yang berkait dengan kepentingan orang banyak sehingga tujuannya dapat menyuarakan opini publik. Ruang publik akan terjadi ketika warga masyarakat menggunakan haknya untuk berkumpul atau mengeluarkan pendapatnya yang mereka anggap penting. Sebuah ruang publik semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam konteks *public sphere*, dunia penyiaran selayaknya menjadi *the marketplace of ideas* yang menjadi tempat penawaran berbagai gagasan.

Di Indonesia, digitalisasi penyiaran sudah sering menjadi pembahasan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Undang-Undang penyiaran baru sebagai ganti dari undang-undang penyiaran lama dengan memasukkan pengaturan penyiaran digital.

Proses digitalisasi penyiaran atau alih pada media ini khususnya media televisi analog menuju digital perlu dikomunikasi dengan kuat, dan terus menerus oleh pemerintah melihat banyak media khususnya di Indonesia secara nasional dan lokal belum melaksanakan migrasi televisi.

Kementerian Komunikasi Dan Informatika merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk bekerja secara cepat mempersiapkan berbagai peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Diantaranya beberapa proses yang diperlukan oleh pemerintah antara lain tentang proses perizinan, tata kelola siaran, dan tanggung jawab lembaga penyiaran maupun pengelola, serta pengawasan tentang penyiaran digital. Selain Kementerian Komunikasi Dan Informatika yang memiliki peran serta dalam mengimplementasikan terselenggaranya peralihan dari televisi analog menuju televisi digital. Terdapat pemerintah daerah setiap provinsi untuk ikut serta bersama mewujudkan digitalisasi dalam perpindahan televisi analog menuju televisi digital.

Dalam hal migrasi ini pemerintah menyiapkan sebuah aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang disahkan Presiden RI 2 November 2020 menjadi *milestone* bagi perkembangan Industri Penyiaran Indonesia. Disahkannya Omnibus Law tersebut mempertegas posisi Indonesia menuju penyiaran digital. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 amanah Digitalisasi Penyiaran terdapat dalam pasal 60 A, yang berbunyi penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Selain undang undang nomor 11 tahun 2020 terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran namun secara konseptual hanya mengatur tentang siaran analog. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang penyiaran untuk mengatasi hambatan

regulasi dalam proses digitalisasi penyiaran. Selain Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, yang dimana aturan ini berisi perlu dilakukannya seleksi penyelenggara *multipleksing* siaran televisi digital terrestrial. Seleksi penyelenggara *multipleksing* siaran televisi digital terrestrial bertujuan untuk menetapkan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai penyelenggara multipleksing di 22 provinsi dalam rangka pembangunan infrastruktur *multipleksing* untuk persiapan penghentian siaran televisi analog. Berdasarkan pernyataan Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika yang telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Digital Terrestrial, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terrestrial. serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial.

Provinsi Lampung pada migrasi penyiaran ini diatur menjadi empat tahapan yakni Wilayah layanan Lampung-1 mencakup kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro jadwal yang ditetapkan ASO tahap 1 yakni pada bulan April. Sedangkan tahap kedua ASO, yaitu 25 Agustus 2022 untuk wilayah layanan Lampung yang mencakup Kabupaten Lampung Utara, kabupaten Way Kanan, dan kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk wilayah Lampung 3 mencakup Kabupaten. Lampung Utara, kabupaten Way Kanan, dan kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk wilayah lain yakni wilayah Lampung 4 mencakup Kabupaten Lampung Barat, kabupaten Tanggamus, dan kabupaten Pesisir Barat yang tidak terdampak ASO.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga yang menjembatani terselenggaranya perpindahan antara televisi analog menuju televisi digital dibutuhkan komunikasi kebijakan. Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan akan aturan peralihan televisi ini sudah dapat dilaksanakan untuk melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dengan menggunakan komunikasi kebijakan di Provinsi Lampung.

Adapun Daftar Siaran TV Digital untuk Wilayah Lampung dalam melakukan migrasi televisi analog menuju televisi digital di Provinsi Lampung sebagai berikut :

Table 1.1 Data Stasiun TV di Lampung

NO	Nama Stasiun
1	LPP TVRI Lampung
2	ANTV
3	TV ONE
4	TRAN 7
5	RCTI
6	GTV
7	MNC
8	I news TV
9	Unila TV
10	Metro TV
11	B channel
12	Indosiar
13	SCTV
14	Nusantara TV Lampung,
15	Harum TV,
16	Gold TV
17	Bhinneka TV,
18	Tegar TV
19	Kompas TV
20	Radar TV
21	Net TV

Sumber : Suara Merdeka.com

Peralihan televisi analog menuju digital ini perlu dilaksanakan menimbang bahwa teknologi penyiaran digital memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital untuk penyiaran televisi peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi

penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada *masterplan* penyiaran analog. Teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan lebih merata. Oleh sebab itu agar peralihan siaran ini merata dan sampai kepada masyarakat seluruh daerah khususnya Lampung perlu diperkuat dengan adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan. Tidak hanya sosialisasi namun bagaimana pemerintah daerah terjun langsung untuk melihat apakah adanya perencanaan besar soal penyiaran ini terlaksana dengan baik.

Menurut Solichin (Abdul Wahab : 2008) Komunikasi Kebijakan Pada prinsipnya merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Implementasi dari sebuah komunikasi mencakup banyak kegiatan yaitu meliputi, badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Selain dari terlaksananya badan anggaran yang paling penting adalah badan-badan sebagai pelaksana.

Implementasi kebijakan adalah bagaimana komunikasi dari kebijakan ini dapat dimengerti oleh masyarakat. Selain itu perumusan sebuah kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

husus sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada persoalan-persoalan khusus. Karena secara luas masyarakat harus mengetahui tentang konsep penyiaran digital termasuk dampak dan manfaat dari proses penyiaran digital tersebut. Selain dari memahami dan mengerti adalah proses dari sosialisasi kebijakan ini proses alih teknologi penyiaran. Karena spektrum frekuensi yang digunakan, baik untuk telekomunikasi maupun penyiaran adalah sumber daya alam yang terbatas, oleh sebab itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Sebagai bahan referensi peneliti guna mempermudah penelitian yang akan dilakukan terdapat penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dengan judul jurnal **“Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital: Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi Revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran”** Dalam penelitian ini, peneliti Frendy Christianto Imanuel Siahaan 1),Guntur F. Prisanto 2),Niken F. Ernungtyas 3),Irwansyah 4),Syahrul Hidayant yakni menggunakan konsep kebijakan komunikasi Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Redi Panuju dengan judul **“Problem Migrasi Siaran Tv Analog Ke Digital”**. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah konstruksi tekstual dengan menganalisis sumber- sumber teks terpercaya dari pemberitaan, jurnal, regulasi, dan lainnya. Teks yang ada dianalisis berdasarkan pendekatan Struktural Fungsional dari Talcott Parson.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana perlu berperan aktif dalam seluruh proses alih teknologi penyiaran, dengan memberikan kejelasan informasi dalam perumusan regulasi teknis, mengawasi setiap tahapan pelaksanaan dalam proses peralihan penyiaran. Penyelenggara daerah perlu memastikan bahwa melalui pelaksanaan penyiaran digital akan semakin banyak wilayah Indonesia yang

mendapatkan akses menerima siaran televisi. Selain itu peralihan ini adalah proses dan dinamika yang kompleks karena terkait dengan berbagai aspek, diantaranya adalah teknologi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu perlu perencanaan dan proses implementasi dan komunikasi sehingga proses peralihan siaran dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari penjelasan penelitian ini peneliti mencoba menganalisis secara teknis implementasi siaran digital maupun hal penting yang juga perlu dipahami oleh masyarakat tentang siaran televisi digital ini. Untuk itu banyak hal yang perlu kembali dianalisis dan tentunya dipahami bagaimana analisis komunikasi kebijakan terhadap migrasi ini, maka peneliti mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yakni **Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Peralihan Televisi Analog Menuju Televisi Digital Di Provinsi Lampung.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi peralihan televisi analog menuju televisi digital di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Proses komunikasi kebijakan peralihan televisi analog menuju televisi digital Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan,

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perpindahan televisi analog menuju televisi digital di Provinsi Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses komunikasi kebijakan peralihan televisi analog menuju televisi digital di Provinsi Lampung

1.4. Manfaat Penelitian

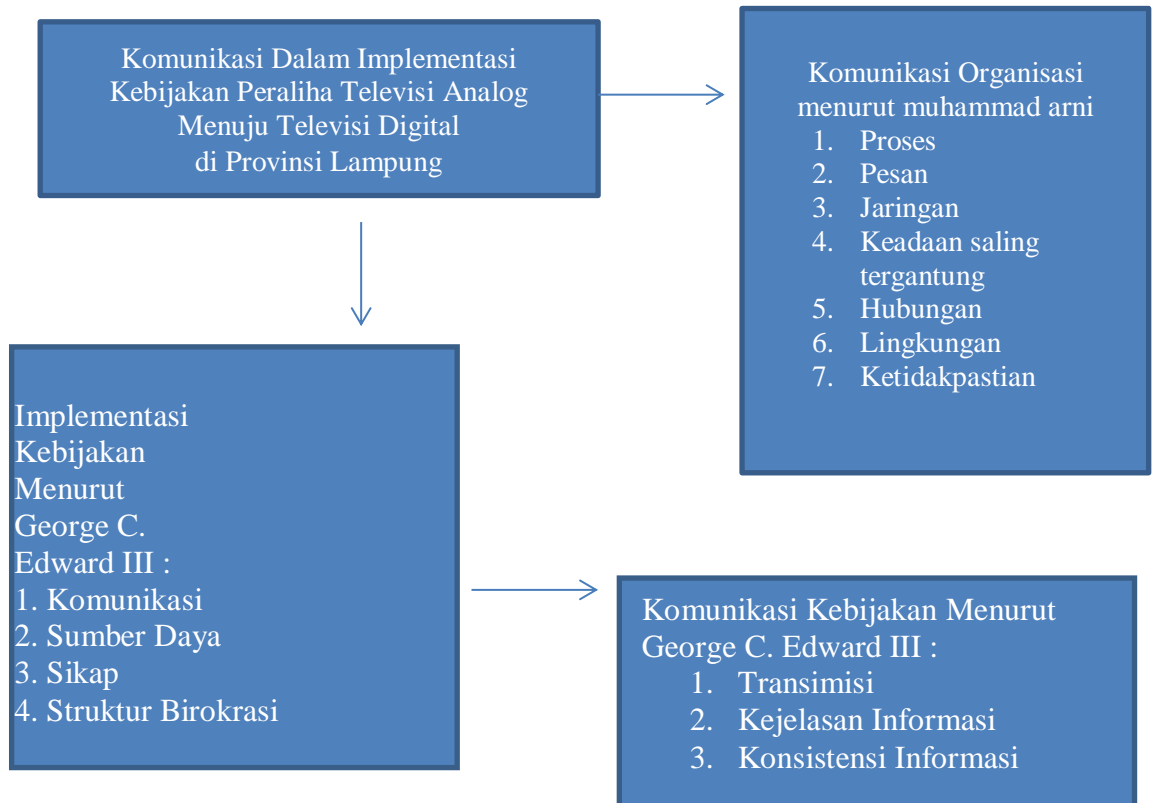
Hasil dari penelitian ini memiliki nilai ataupun manfaat pada dua aspek yakni pada bidang akademis dan praktis :

1. Pada manfaat akademis bagi pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, terutama dalam bagian pengembangan media pada khususnya. Selain itu hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pendoman atau landasan teori ilmu komunikasi terhadap penelitian sejenisnya untuk tahap berikutnya penelitian ini memberikan kontribusi wawasan pada kajian tentang komunikasi kebijakan khususnya pada peralihan televisi analog menuju televisi digital khususnya pada Provinsi Lampung. Serta pendalaman pengetahuan masyarakat di Provinsi Lampung dalam implementasi dari undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan.
2. Pada manfaat praktis hasil dalam penelitian ini dapat digunakan dinas komunikasi Provinsi Lampung beserta komisi penyiaran daerah lampung dalam implementasi peralihan televisi analog menuju televisi digital.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti mencoba melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah Lampung dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan komunikasi kebijakan berkaitan dengan migrasi televisi analog menuju digital. Objek media televisi lokal dalam memenuhi segmen pasar informasinya serta masyarakat dalam pemahaman perpindahan migrasi televisi ini. Maka dari itu untuk mengupas dan memandu peneliti dalam menjawab

rumusan masalah peneliti menggunakan beberapa konsep komunikasi kebijakan dan model implementasi untuk memandu terkait penelitian yang hendak diteliti maka peneliti menggunakan implementasi komunikasi kebijakan :



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penjelasan mengenai penelitian terdahulu, akan menjadi referensi pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pembanding yang dapat menjelaskan kebaruan penelitian pada rencana penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis akan menjelaskan terkait temuan data yang telah didapat oleh peneliti sebelumnya, metode penelitian yang digunakan serta rencana penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu telah penulis temukan, berikut merupakan penelitian konvergensi dan komunikasi kebijakan yang telah ditinjau seperti bagan yang ada di bawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Peneliti	Perbedaan Dan Kontribusi Penelitian
1.	Abdul Firman Ashaf	Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat.	Tujuan untuk menjelaskan relasi media, negara, dan masyarakat dalam pandangan teori strukturasi Anthony Giddens.	Metode pada penelitian sebelumnya ialah kepustakaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi media, negara dan masyarakat adalah sebuah praktik sosial, bukan dikuasai oleh negara atau kelas dominan. Sebab media senantiasa berada dalam situasi dinamis, cair, dan prosesual. Dalam situasi historis tertentu media dapat mereproduksi artikulasi ideologis negara, namun dalam situasi lain media dapat menciptakan strategi-strategi resistensi.	Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Firman Ashaf (2017) lebih luas meneliti terkait relasi media, negara dan masyarakat adalah sebuah praktik sosial, bukan dikuasai oleh negara atau kelas dominan. Kontribusi penelitian ini berkaitan dengan komunikasi kebijakan serta implementasi yang terjadi yang dibentuk untuk migrasi dari televisi analog menuju televisi digital.
2.	Aji Muhawarman, Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti	Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan	Tujuan Penelitian Ini Untuk Menganalisis Proses Kebijakan Dan Menghasilkan Formulasi Kebijakan Komunikasi Publik (Berupa Rancangan Pedoman)	Penelitian Deskriptif Menggunakan Metodologi Kualitatif, Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Wawancara Mendalam, Focus Group Discussion Dan Telaah Dokumen	Hasil penelitian menunjukkan fungsi komunikasi yang dijalankan telah mengalami kemajuan, tetapi masih ada permasalahan dan tantangan, baik internal maupun eksternal, antara lain belum memiliki pedoman komunikasi yang dijadikan acuan dalam mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dan mengatur hal-hal kehumasan yang mendasar dan menyeluruh	Penelitian yang dilakukan oleh aji muhawarman dan kawan-kawan (2017) lebih meneliti bagaimana formulasi komunikasi kebijakan public berupa program kesehatan masyarakat. Dan Kontribusi penelitian ini memiliki kesamaan dalam kajian ini yakni komunikasi kebijakan namun erat kaitan bagaimana implementasi yang dibentuk untuk migrasi dari televisi analog menuju televisi digital dalam model komunikasi

						pembangunan.
3.	Muthia Balqis	Mediamorphosis Di Era Digital (Studi Kasus Fajar Sumatera Provinsi Lampung)	Tujuan Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis, Bagaimana Langkah Yang Dilakukan Oleh Media Fajar Sumatera Dalam Bersaing Di Era Digital	Metode pada penelitian ini yakni deskriptif Kualitatif	Di era digital media harus mampu untuk menciptakan inovasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta aplikasi yang telah tersedia hal ini harus dilakukan agar media tetap bisa bertahan ditengah peradaban dan eksis.	Penelitian yang dilakukan oleh muthia balqis (2021) merupakan penelitian yang berkaitan berkaitan dengan sistem dan pola media dalam memproduksi sebuah produk yang berkaitan dengan situasi. Memiliki point tentang media yang sama namun, Kontribusi penelitian ini dalam mencakup dalam kajian komunikasi kebijakan yang erat kaitan bagaimana implementasi yang dibentuk untuk migrasi dari televisi analog menuju televisi digital dalam model komunikasi pembangunan.
4.	Amar Ahmad	Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya	Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan “segudang” kecanggihan dan kemudahan yang dibawanya mampu mengantar manusia ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. Oleh karena itu,	Metode penelitian sebelumnya dengan penelitian kualitatif dan metode studi kasus.	Penggunaan teknologi tanpa diimbangi pengetahuan dan etika, sulit memberi kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya pengetahuan terhadap suatu bidang tanpa pemanfaatan teknologi, hanya menghasilkan sebuah ikhtiar yang panjang dan melelahkan. Usaha meminimalisasi kesenjangan	Penelitian yang dilakukan oleh amar ahmad (2012) terkait dengan objek penelitian dan sistem teknologi multimedia yang menjadi bahasan. Perbedaan dengan Kontribusi penelitian ini dalam mencakup dalam kajian komunikasi kebijakan yang erat kaitan

			<p>pemerataan pemahaman terhadap teknologi ini merupakan dasar berpijak bagi totalitas masyarakat untuk dapat memasuki era globalisasi. Penggunaan teknologi tanpa diimbangi pengetahuan dan etika, sulit memberi kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat</p>		<p>pengetahuan (knowledge divide), khususnya pengetahuan tentang teknologi dapat mendorong berkurangnya kesenjangan kesejahteraan (prosperity divide) dalam masyarakat. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai potensi perkembangan teknologi dan standar yang dimilikinya memungkinkan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi yang ada. Istilah gagap teknologi dan buruh teknologi terlebih lagi kesenjangan digital (digital divide) akan jauh dari masyarakat Indonesia apabila secara totalitas terbangun kesadaran bersama pentingnya pengetahuan tentang aspek teknologi ini.</p>	<p>bagaimana implementasi yang dibentuk untuk migrasi dari televisi analog menuju televisi digital dalam model komunikasi pembangunan.</p>
5.	Irawan Wibisono	Kebijakan redaksional dalam konvergensi media (studi kasus jawa pos)	<p>Bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan redaksional Jawa Pos dalam menghadapi konvergensi media dan menganalisis dampak konvergensi media terhadap pola kerja wartawan Jawa Pos.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Jawa Pos sebagai perusahaan telah siap menghadapi seluruh perubahan yang ada di industri media. Jawa Pos menggunakan kebijakan redaksi adaptif dalam menghadapi konvergensi. Kebijakan adaptif dipilih untuk merespon tekanan eksternal berupa perkembangan kemajuan teknologi. Dengan kebijakan itu</p>	<p>Penelitian Irawan Wibisono (2018) terkait kebijakan redaksional Jawa Pos dalam menghadapi konvergensi media dan menganalisis dampak konvergensi media terhadap pola kerja wartawan Jawa Pos. Perbedaan dengan Kontribusi penelitian ini</p>

					redaksi Jawa Pos melakukan berbagai perubahan, yakni perubahan tata kelola ruang redaksi, perombakan struktur redaksi dan perubahan pakem penulisan.	dalam mencangkup dalam kajian komunikasi kebijakan yang erat kaitan bagaimana implementasi yang dibentuk untuk migrasi dari televisi analog menuju televisi digital dalam model komunikasi pembangunan
--	--	--	--	--	--	--

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber : *kajian penelitian dari berbagai sumber (2023)*

2.2. Komunikasi Organisasi

Menurut Muhammad (2009), komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Menurut Pace dan Faules (2010), komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarkis antara yang satu dengan lainnya dengan indikator.

Menurut Romli (2011), komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.

Menurut Liliweri (2004), komunikasi organisasi memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai berikut: :

1. Sebagai Tindakan Organisasi

Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mengkoordinasikan sebagian atau seluruh tugas dan fungsi organisasi yang di bagi-bagi dalam bagian yang melaksanakan visi dan misi organisasi di bawah pimpinan atau manajer serta bawahan mereka. Tanpa komunikasi, maka organisasi hanya merupakan kumpulan orang-orang yang terbagi dalam tugas dan fungsi masing-masing yang melaksanakan aktivitas mereka tanpa keterkaitan satu sama lain (tanpa sinkronasi dan

harmonisasi). Organisasi tanpa komunikasi dan koordinasi sama dengan organisasi yang menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerja sama.

2. Membagi Informasi

Salah satu tujuan komunikasi yang penting adalah menghubungkan seluruh aparatur organisasi dengan tujuan organisasi. Komunikasi mengarahkan manusia dan aktivitas dalam organisasi. Sebuah informasi atau pertukaran informasi berfungsi untuk membagi kemudian menjelaskan informasi tentang tujuan organisasi, arah dari suatu tugas, bagaimana usaha untuk mencapai hasil dari pengambilan keputusan.

3. Menampilkan Perasaan dan Emosi.

Di dalam organisasi terdapat sekumpulan manusia yang bekerja sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain. Mereka mempunyai kebutuhan dan keinginan, perasaan dan emosi yang harus diungkapkan kepada orang lain.

Menurut Muhammad (2009), komunikasi organisasi memiliki tujuh aspek yang menjadi kunci konsep utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Proses* Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis, menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya, karena gejala menciptakan dan menukar informasi yang berjalan terus menerus dan tidak ada henti-hentinya maka dikatakan sebagai suatu proses
- 2) *Pesan* adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Untuk berkomunikasi seseorang harus sanggup menyusun suatu gambaran mental, memberi gambaran itu dan mengembangkan suatu perasaan terhadapnya. Komunikasi tersebut efektif kalau pesan yang dikirim atau diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim.

Simbol-simbol yang digunakan dalam pesan dapat berupa verbal dan nonverbal

- 3) *Jaringan* Organisasi terdiri dari beberapa orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi.
- 4) *Keadaan saling tergantung* Konsep kunci dari komunikasi organisasi yang keempat adalah keadaan yang saling tergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka.
- 5) *Hubungan* Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana yaitu hubungan di antara dua orang atau diadik sampai kepada hubungan yang kompleks, yaitu hubungan dalam kelompok kecil maupun besar dalam organisasi
- 6) *Lingkungan* Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
- 7) *Ketidakpastian* Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi.

Menurut Pace dan Faules (2010), terdapat beberapa jenis komunikasi organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi Ke Bawah

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas yang lebih rendah.

2. Komunikasi Ke Atas

Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan), ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia). Semua pegawai dalam sebuah organisasi, kecuali mungkin mereka yang menduduki posisi puncak, mungkin berkomunikasi ke atas-yaitu, setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik atau meminta informasi dari atau memberi informasi kepada seseorang yang otoritas lebih tinggi dari pada dia. Suatu permohonan atau komentar yang diarahkan kepada individu yang otoritasnya lebih besar, lebih tinggi, atau lebih luas merupakan esensi komunikasi ke atas.

3. Komunikasi Horizontal

Komunikasi Horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Misalnya di sebuah universitas, unit kerja dapat berupa sebuah jurusan semuanya meliputi dosen-dosen yang dipimpin oleh seorang ketua jurusan. Komunikasi di antara dosen-dosen dalam sebuah jurusan disebut komunikasi horizontal. Komunikasi dosen jurusan yang satu dengan dosen jurusan yang lainnya disebut komunikasi lintas-saluran, yaitu informasi diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja, dan di antara orang-orang yang satu sama lainnya tidak saling menjadi bawahan atau atasan.

4. Komunikasi Lintas Saluran

Dalam kebanyakan organisasi, muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka. Misalnya, bagian-bagian seperti teknik, penelitian, akunting, dan personalia mengumpulkan data, laporan, rencana persiapan, kegiatan koordinasi, dan memberi nasihat kepada manajer mengenai pekerjaan pegawai di semua bagian organisasi. Mereka melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka dan terutama harus mempromosikan gagasan-gagasan mereka. Namun, mereka memiliki mobilitas tinggi dalam organisasi; mereka dapat mengunjungi bagian lain atau meninggalkan kantor mereka hanya untuk terlibat dalam komunikasi informasi.

Komunikasi dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan. Bahkan masalah komunikasi memiliki skala yang cukup tinggi yakni 8 dari 10 masalah dalam sebuah organisasi. Hal tersebut menunjukkan masalah komunikasi sangat sensitif sehingga bisa mengakibatkan masalah yang cukup berarti dalam sebuah organisasi bahkan akan berdampak pada perkembangan organisasi tersebut. Berikut ini beberapa hambatan komunikasi dalam sebuah organisasi yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut :

1) Hambatan Teknis

Hambatan teknis adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dilihat dari sisi teknologi, maka hambatan ini akan semakin berkurang seiring dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan informasi,

sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Beberapa jenis hambatan teknis dari komunikasi di antaranya adalah; 1) Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, 2) Kurangnya informasi atau penjelasan, 3) Kurangnya keterampilan membaca, dan 4) Pemilihan media yang kurang tepat.

2) Hambatan Semantik

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Faktor pemahaman bahasa dan istilah tertentu serta kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya adanya perbedaan bahasa (bahasa daerah, nasional maupun internasional) serta adanya istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja, misalnya bidang bisnis, industri, kedokteran dan lain sebagainya.

3) Hambatan Manusiawi

Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca-indra seseorang dan lain sebagainya.

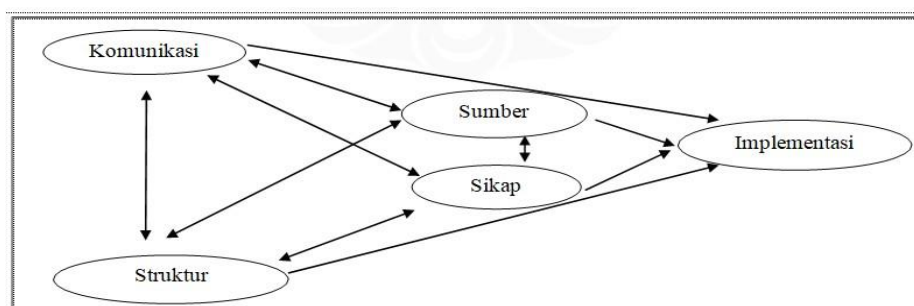
2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana di

dalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta,1990). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab:1997)

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar 2.2. dibawah ini :



2.1 Empat faktor yang berpengaruh Implementasi kebijakan Publik George C. Edward III

2.3.1. Konsep Komunikasi

Menurut Agustino (2006) "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/menduga.

2. Konsistensi.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005) .

3. Kejelasan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Jika informasi yang disampaikan perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, konsep komunikasi kebijakan dibagi atas 3 hal ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

2.3.2. Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi :

2.3.2.1 Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.3.2.2 Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

2.3.2.3 Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan,

pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.3.2.4 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

2.3.3. Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut Winarno (2004) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

2.3.4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personel baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan

organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan antara lain; Van meter Van horn, Mazmanian sabatier, Grindle, George Edward III. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi migrasi televisi analog menuju televisi digital dengan menggunakan 4 variabel yakni(komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teori Edward III.

2.4. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan, model implementasi

kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni;

- 1) komunikasi,
- 2) sumberdaya,
- 3) disposisi dan kemudian
- 4) struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, George C. Edward sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

Triple Helix merupakan interaksi antara pemerintah, bisnis dan universitas yang dikembangkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff pada tahun 1990. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu juga menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis Triple Helix adalah bahwa antara akademisi, industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi. Hubungan yang muncul dalam Triple Helix, umumnya bermula dari upaya pemecahan masalah dan menghasilkan strategi ketika menghadapi masalah dalam inovasi, bukan ditentukan dari suatu pola tertentu. Melalui proses interaksi ini maka akan terjadi perubahan aktor dan peran yang mereka lakukan (Leydesdorff dalam Muhammad Fakhru, 2018). Dengan demikian, pola triple-helix inovasi adalah dinamis seiring perubahan waktu.

Menurut (Nurati, 2016) Komunikasi kebijakan (sosialisasi) bisa membantu masyarakat menemukan norma dan kesesuaian baru dalam implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan pula dapat membantu pelaksana dan sasaran bekerjasama untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Solichin Abdul Wahab (2005), pada dasarnya komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang berlangsung di dalam suatu pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan sebagai transmisi pesan dan program. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan tidak lepas dari permasalahan dalam komunikasi organisasi (Nurati, 2016).

Arah formulasi kebijakan komunikasi dapat diketahui melalui tiga hal. Pertama, adalah konteks. Konteks dalam kebijakan komunikasi diartikan sebagai sesuatu yang melingkupi kebijakan tersebut

misalnya politik ekonomi dan politik komunikasi. Posisi konteks menjadi sangat penting karena dapat menentukan bagaimana domain dari sebuah kebijakan komunikasi. Kedua, adalah domain. Domain diartikan sebagai muatan nilai yang terkandung dalam kebijakan komunikasi. Domain sering disebut juga sebagai fungsi kebijakan komunikasi. Contoh domain yaitu globalisasi, ekonomi global, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika kebijakan komunikasi memiliki konteks yaitu politik ekonomi, maka domain kebijakan tersebut adalah ekonomi global. Ketiga, adalah paradigma. Paradigma merupakan cita-cita dari dibuatnya sebuah kebijakan komunikasi misalnya terbentuknya masyarakat informasi, penguatan civil society, dan sebagainya (Abrar, 2004, 2008; Chakravartty & Sarikakis, 2006)

2.4.1. Penyaluran Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan. Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut (Winarno : 2002) hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan.
- b. Adanya hirarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
- c. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan- persyaratan suatu kebijakan.

2.4.2. Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak.

Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan

pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

2.4.3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan

secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2.5. Digitalisasi

Digitalisasi adalah bagian dari pelestarian yang berupaya untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital seperti soft file, foto digital, microfilm beserta mengupayakan agar naskah asli atau naskah duplikatnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Menurut Restiningsih (2009, 24) “digitalisasi manuskrip adalah proses pengalihan manuskrip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk digital atau menjualnya dengan melakukan proses scanning atau membuatnya dengan kamera digital.” Digitalisasi naskah kuno dilakukan agar isi kandungan informasi dari naskah tetap terjaga jika sewaktu-waktu fisik naskah tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan menurut Chowdhury yang dikutip oleh Husna (2013, 1) menyatakan bahwa:

“Digitization is the process of taking a physical item, such as a book, manuscript or photograph, and making a digital copy of it. Digitization entails creating a digital copy of an analogue object”.

Maksud dari ahli tersebut yaitu digitalisasi merupakan suatu proses mengalihmediakan bentuk cetak bahan pustaka seperti manuskrip atau naskah kuno ke dalam bentuk digital yang mencakup pembuatan salinan file yang berbentuk analog. Selain pendapat di atas, Gardjito (2002, 13) mengemukakan bahwa: Kelebihan bentuk digital dibandingkan dengan bentuk media lain yaitu informasi digital ikut membentuk sebagian besar peningkatan budaya dan warisan intelektual bangsa serta memberikan manfaat yang penting bagi penggunaannya. Salah satu contoh dari kelebihan produk digital adalah dikemas dalam bentuk CD-ROM yang cara penulisannya berbeda dari cara pengaksesan informasi melalui jaringan internet. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa digitalisasi adalah suatu proses mengalihkan bentuk asli bahan pustaka seperti buku dan naskah kuno ke dalam bentuk digital yang mencakup pembuatan salinan dalam bentuk analog dengan melakukan scanning atau membuatnya dengan menggunakan kamera digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Kuhn (Lubis : 2016) secara umum adalah beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima seperti: hukum, teori, aplikasi dan instrumen yang diterima bersama, sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi-tradisi yang kokoh dalam riset-riset ilmiah khusus. Paradigma berarti “pola”, “model”, atau “skema” dan “pemahaman” aspek-aspek tertentu ihwal realitas (kenyataan) yang dikaji. Kelebihan paradigma (metateori) untuk membedakan berbagai metodologi dengan begitu jelasnya sehingga dengan mudah mampu membedakan suatu teori, konsep, metodologi, dan aksi antara yang satu dari yang lainnya (Agusta: 2014). Menurut Kuhn (dalam Agusta, 2014) paradigma menunjuk kepada dua hal. Pertama, suatu pandangan tertentu terhadap suatu entitas atau bisa dinyatakan sebagai sisi ontologis entitas tersebut. Sisi ontologis paradigma kritis, misalnya melihat keberadaan represi kekuasaan dalam sejarah suatu komunitas. Kedua, suatu perilaku dari entitas tersebut yang mencakup metodologi maupun instrumen atau peralatan yang dibutuhkan untuk menggalinya, sampai kepada aksiologi beserta sekelompok orang pendukung paradigma yang dianut tersebut.

Penentuan paradigma pada ilmu sosial merupakan suatu hal yang penting, mengacu pada paparan terkait paradigma menurut peneliti diatas, maka paradigma sejatinya mampu membantu peneliti untuk menemukan sudut pandang dalam melihat suatu permasalahan. Di lain sisi, paradigma juga bermanfaat untuk membantu dalam penentuan teori dan metode yang tepat pada penelitian. Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah paradigma konstruktivis.

Secara histori, paradigma konstruktivis pada rumpun ilmu sosial merupakan suatu kritik terhadap paradigma positivisme. Pada paradigma ini, bahasa bukan lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami kebenaran objektif saja dan terpisah dari subjek sebagai penyampaian pesan.

Konstruktivisme menganggap subjek pada penelitian sebagai faktor sentral pada kegiatan komunikasi dan lingkup kehidupan sosialnya. Kemudian subjek memiliki kemampuan dalam hal kontrol terhadap pengertian-pengertian tertentu di setiap wacana.

paradigma ini melihat bahwa masing-masing individu memiliki suatu pengalaman unik yang memungkinkan penelitian ini memandang dunia adalah valid, yang karenanya dibutuhkan rasa saling menghargai atas pandangan itu. Pada level ontologi, paradigma konstruktivis melihat fakta sebagai hal yang ada tetapi dengan realitas yang majemuk, serta memiliki makna yang berbeda bagi setiap individu. Pada level epistemologi, pendekatan subjektif digunakan sebagai upaya untuk menjabarkan konstruksi makna oleh individu. Sedangkan pada level metodologi, paradigma ini memakai macam-macam jenis pengkonstruksian serta menggabungkannya di dalam konsensus. (Hidayat, 2003: 97). Batasan paradigma konstruktivisme terdapat pada level ontologi, epistemologi dan metodologi sebagaimana dijelaskan diatas, pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial untuk menjelaskan bagaimana pelaku sosial memelihara dunia sosial mereka menjadi pandangan utama sekaligus batasan pada paradigma ini.

Terdapat dua aspek yang dilibatkan pada paradigma ini, yakni hermeneutik dan dialektik. Hermeneutik adalah sebuah aktivitas merangkai teks-percakapan, tulisan maupun gambar. Sedangkan dialektik adalah suatu pendekatan dengan mengutamakan dialog agar subjek yang diteliti dapat diketahui pemikirannya serta membandingkan dengan cara berpikir peneliti, sehingga tercipta sebuah harmonisasi komunikasi dan interaksi yang maksimal. (Hidayat: 2003). Penjelasan diatas menyimpulkan suatu hal bahwa peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dalam proses menganalisis komunikasi kebijakan migrasi televisi analog menuju televisi digital, serta Cara pandang dan konsep dari paradigma ini akan digunakan sebagai acuan peneliti dalam mengungkap fenomena yang ada.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan atau penggunaan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia (John W. Creswell, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha mengungkap suatu masalah/keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti (Hadar Nawawi: 2003).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara jelas terkait fenomena yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2014:450), pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk menunda interpretasi tentang apa yang dikatakan oleh partisipan. Pendekatan fenomenologi, menurut Polkinghorne (1989) dalam Creswell (2014: 452), menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia.

Menurut Cribbe (1986) dalam Creswell (2014: 453), fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran

individu secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi-interaksi antara kesadaran-kesadaran. Pendekatan fenomenologi menurut Schutz digunakan untuk mengkaji cara-cara anggota masyarakat menyusun dan membentuk ulang dalam kehidupan sehari-hari (Denzin, 2009:336). Sedangkan menurut Husserl (1998) peneliti fenomenologis berusaha mencari tentang hal-hal yang perlu (esensial), struktur invarian (esensi) atau arti pengalaman yang mendasar dan menekankan pada intensitas 51 kesadaran dimana pengalaman terdiri hal-hal yang tampak dari luar dan hal-hal yang berada dalam kesadaran masing-masing berdasarkan memori, image dan arti.

Sementara Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia. Peneliti membangun sebuah dan gambaran yang kompleks dan menyeluruh menganalisa kata-kata, melaporkan secara detail pandangan responden dan melakukannya dalam sebuah setting penelitian yang naturalis (Creswell, 1998). Berikut 3 prinsip dasar fenomenologi yaitu :

- 1) Bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu. Jadi, fenomenologi lebih mengitari penelitian untuk pemahaman subjektif ketimbang mencari objektivitas sebab akibat dan penjelasan universal.
- 2) Makna adalah derivasi dari potesialitas dari sebuah objek atau pengalaman yang khusus dari kehidupan pribadi. Dalam artian, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup.
- 3) Kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia alami dan makna, dibangun melalui bahasa.(Ardianto dan Q-Anees, 2007) Bogdan dan Taylor menggambarkan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu atau perilaku yang diamati. (Moleong: 2011). Memahami pengalaman manusia adalah dasar dari pendekatan fenomenologis untuk penelitian, sebuah konsep yang

diperkenalkan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl di awal 1900-an (Jones, 2001).

Pandangan Husserl dikembangkan menjadi bentuk yang lebih interpretative oleh Heidegger dan Gadamer (Koch, 1999). Asumsi dasar dari fenomenologi ada tiga yaitu:

1. pengetahuan adalah kesadaran
2. makna tergantung dari fungsi makna terhadap pengalaman individu
3. bahasa sebagai sarana makna.

Setiap pengetahuan yang didapatkan manusia merupakan hasil dari pengalaman sadar melalui penginderaan melalui penglihatan, pendengaran, sensasi sensoris lainnya. Pun pengetahuan didapatkan melalui interaksi yang dilakukan individu dengan individu lainnya. Sedangkan makna akan dihadirkan oleh individu tergantung dari fungsi makna tersebut pada pengalaman individu. Sebagai contoh individu yang mempunyai pengalaman tidak mendapatkan pendidikan tinggi bisa jadi ketika ditanyakan tentang pendidikan tinggi dia akan menganggap tidak penting. Sedangkan manusia memerlukan bahasa untuk memahami pengalaman sadar yang dialaminya untuk dapat menjadi pengetahuan.

Fenomenologi dapat dilihat sebagai dua pendekatan :

1. sebagai aliran filsafat
2. sebagai metode penelitian.

Sebagai aliran filsafat fenomenologi dibagi dalam empat perspektif besar dan peneliti memilih fenomenologi Hermeneutik :

Martin Heidegger (1889-1976), siswa Husserl, menolak teori pengetahuan yang dikenal sebagai epistemologi, dan mengadopsi ontologi, lebih memberi perhatian pada konsep “ada” atau ilmu wujud. Heidegger mengembangkan fenomenologi interpretatif dengan memperluas hermeneutika, filsafat interpretasi (Creswell J. , 1994). Fenomenologi versi Heidegger ini menekankan pada pembelajaran

tentang konsep yang dikonstruksikan dari pemahaman. Hermeneutika bergerak melampaui deskripsi dari konsep umum pengalaman dan mencari makna dalam kejadian sehari-hari (Lopes KA, 2004). Menurut Heidegger dalam fenomenologi konsep bracketing (tanda kurung) tidak diperlukan karena dalam hermeneutika dianggap bahwa pengalaman adalah pemahaman (Dahlberg, 2008).

Secara operasional penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi memiliki beberapa karakteristik diantaranya :

1. fokus pada sesuatu yang tampak
2. tertarik dengan keseluruhan
3. mencari makna dan hakikat dari penampakan
4. deskripsi pengalaman bukan menjelaskan atau menganalisisnya
5. berakar pada pertanyaan tentang fenomena yang diamati
6. integrasi subjek dan objek
7. investigasi dalam kerangka Intersubjektivitas

Subjek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian merupakan subyek yang dapat memberikan data mengenai masalah yang diteliti. Teknik pemilihan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan purposive sampling dimana dalam proses penentuan informan akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri. Disini, perspektif peneliti dalam memilih sampel dinilai dari apakah seseorang tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi ataukah tidak. (Pujileksono, 2015: 116).

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan bahwa, "Key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut." Dengan demikian key informan adalah orang yang

dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka informan dalam penelitian ini yaitu: sebagai informan utama adalah kepala dari Balai monitoring dan episentrum frekuensi kelas II B, informan utama dua Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika provinsi Lampung, Informan utamatiga Kepala stasiun TVRI Lampung, Informan tamabahan pertama yakni General manger Radar TV Lampung dan juga ketua komisi penyiaran Indonesia daerah Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks tulisan dan kata- kata tertulis (Moleong: 2007). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono: 2014). Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis kualitatif, Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

3.3. Unit Analisis

Speadly memaparkan tiga komponen dari unit analisis, yaitu:

1. Tempat (*Place*), yakni sebuah tempat dilakukannya penelitian yang sedang diteliti dan berlangsung.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tempat berlangsungnya penelitian ini adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi lampung.

2. Pelaku (*Actor*), yakni informan yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan pemaparan terkait penelitian yang dilakukan, maka pelaku atau subjek dari penelitian ini adalah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi lampung yang memiliki jabatan struktural atau fungsional, serta mengikuti secara langsung peralihan migrasi televisi analog menuju televisi digital.
3. Kegiatan (*Activity*), yakni kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam situasi tertentu. Adapun bentuk kegiatan yang diteliti adalah proses migrasi televisi analog menuju digital dan tim terkait. (Sugiyono: 2011).

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Spradley, dalam Prastowo (2016) menyebutkan adanya 3 (tiga) elemen pada penelitian kualitatif yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang memiliki interaksi strategis. (Prastowo: 2016). Objek penelitian pada penelitian ini adalah komunikasi kebijakan migrasi televisi analog menuju televisi digital di provinsi Lampung. Subjek penelitian pada penelitian kualitatif menurut Amirin (1986) disebut informan, yaitu sekumpulan orang-orang yang memberikan informasi berisikan bahan atau data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yang sedang dijalani (Idrus: 2009). Adapun subjek pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Lampung yang melingkupi jabatan struktural atau fungsional seperti kepala dinas komunikasi dan informatika di provinsi Lampung yang mengikuti proses migrasi televisi analog menuju televisi digital.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan purposive sampling dimana dalam proses penentuan informan akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri. Disini, perspektif peneliti dalam memilih sampel dinilai dari apakah seseorang tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi atau tidak. (Puji Leksono: 2015).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti pada Pimpinan dan juga kepala bidang setiap instansi yang dapat memberikan pengalaman dan juga gambaran terkait migrasi televisi analog ke digital di Provinsi Lampung.

2. Observasi

Pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono: 2013). Dalam observasi secara langsung ini, peneliti berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati. Selain itu terdapat dua cara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam observasi lapangan yaitu:

a. Observasi terus terang

Peneliti menyatakan secara terus terang terhadap narasumber mengenai data yang dibutuhkan dalam pengamatannya, selain itu peneliti mengamati apa yang dikerjakan oleh narasumber, dengan mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi penuh dalam aktivitas yang dilakukannya, sehingga mendapatkan data yang lengkap.

b. Observasi yang tak berstruktur

Observasi ini dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, sehingga peneliti dapat pula melakukan pengamatan bebas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa dokumen catatan, gambar, atau segala informasi yang dapat menunjang kedalaman analisis dan temuan data dalam penelitian ini. Baik berdasarkan kegiatan.

3.6. Keabsahan Data

Penelitian ini menganut pendekatan kualitatif, dimana pada proses analisis data yang berhasil dikumpulkan, penelitian kualitatif menggunakan uji non-statistik, dengan pemaparan secara deskriptif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong tentang teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Ketika melakukan suatu penelitian, ikut sertanya peneliti menentukan hasil yang didapat pada saat pengumpulan data. adanya perpanjangan keikutsertaan, data yang diperoleh selama masa turun lapangan akan mudah untuk dipilih kembali dari gangguan maupun distorsi yang biasanya ada pada suatu penelitian. Perpanjangan keikutsertaan dipilih pada penelitian ini guna mematangkan data yang diperoleh, serta memungkinkan peneliti untuk memilih data-data yang didapat.

2. Triangulasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data, selain perpanjangan keikutsertaan sebagaimana dijelaskan diatas. Triangulasi pada dasarnya dilakukan guna melihat kembali dan memberikan perbandingan dari kepercayaan data yang peneliti

peroleh dengan menggunakan waktu dan alat yang berbeda. (Moleong, 2007: 323). Teknik triangulasi pada penelitian ini berguna untuk memastikan keabsahan data yang didapat dari narasumber utama, triangulasi ini bisa didapat dari seluruh informan yang turut serta pada proses migrasitelevisi digital.

3.7. Teknis Analisis Data

Pada bagian ini peneliti menggunakan suatu teknik yang memungkinkan peneliti untuk mengorganisasikan atau memilah beragam data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, sehingga data tersebut mampu disajikan dan dijelaskan secara ringkas kepada orang lain. Teknik ini dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sampai menemukan titik jenuh, dengan ukuran tidak adanya data ataupun informasi baru yang didapat. Miles dan Huberman memaparkan langkah-langkah dalam menganalisis data yang sekaligus peneliti lakukan sebagaimana berikut:

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memberikan fokus terhadap suatu hal yang dianggap penting pada sebuah penelitian. Data yang diperoleh pada masa penelitian biasanya memiliki jumlah yang banyak sehingga perlu untuk dianalisis dan direduksi. Oleh karenanya, akan terlihat jelas gambaran penelitian tersebut sehingga mempermudah peneliti dalam proses pengambilan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.

3. Verifikasi Data (Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Analisa data merupakan proses dalam mencari dan menyusun sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan lainnya sehingga nantinya dapat mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tiga teknik. Yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dalam wawancara kemudian diolah dengan proses seperti pada bagan, yakni melakukan pengetikan teks untuk kemudian dibaca ulang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan merupakan jawaban dari kumpulan hasil dan pembahasan terkait dengan Komunikasi kebijakan migrasi televisi analog ke digital dan implementasinya di provinsi lampung, baik yang bersumber dari wawancara maupun observasi. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar dapat mencapai sasaran tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam melaksanakan implementasi membutuhkan komunikasi sebagai jembatan pemberian informasi kepada pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan program secara tepat dalam menyampaikan informasi. Di Indonesia saat ini khususnya provinsi lampung kebijakan perpindahan televisi analog ke digital yang dalam pelaksanaannya dibuat massif perlu dan penting menggunakan dimensi komunikasi yang dapat mempermudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan peralihan televisi analog menuju digital agar dapat tersampaikan oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu dimensi komunikasi dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program migrasi televisi analog ke digital, dikarenakan melalui informasi dapat memberikan sosialisasi, kejelasan dan konsistensi informasi berkaitan migrasi televisi analog dan digital.
- b. Penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa proses komunikasi dari implementasi kebijakan yang dimana elemen komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi pada peralihan

televisi analog ke digital perlu memperhatikan penggunaan elemen tersebut khususnya pada komunikasi, karena dalam proses komunikasi khususnya pada komunikasi organisasi yang digunakan baik pesan maupun jaringan perlu diperkuat karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah agar pelaksanaan dari kebijakan ini sesuai dengan tepat waktu, meskipun pada akhirnya sampai dengan 2 November batas dari *Analog switch off* juga belum terlaksana di provinsi lampung. Maka perlu proses komunikasi yang lebih berkala serta adanya sebuah kejelasan informasi dengan formula dan tahapan yang jelas. Karena dari hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan peneliti peralihan ini terkendala juga pada pembagian *set top box* yang belum memenuhi target dalam pendistribusiannya. Jika sumber daya manusia serta peralatan di setiap penyelenggara penyiaran sudah memenuhi sesuai dengan digitalisasi maka sikap pelaksana juga harus memberikan kejelasan informasi berkaitan ASO di provinsi lampung. Terakhir kementerian komunikasi dan informatika telah menyediakan fasilitas pengecekan *set top box* agar masyarakat mengetahui apakah dalam kategori tertentu mendapatkan STB atau tidak dan pelayanan ini mudah untuk diakses meskipun dari data berkaitan nama-nama apakah menyesuaikan dengan kondisi masyarakat masih belum ada ketentuan soal hal itu.

5.2. Saran

Pada suatu penelitian tentu saja terdapat beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti guna pengembangan kebermanfaatan kepada berbagai pihak. Terdapat beberapa saran baik dalam lingkup umum maupun akademis. Adapun beberapa saran tersebut adalah :

5.1.1 Saran Secara Umum

Penelitian yang telah dilakukan mengungkap bagaimana implementasi kebijakan, dan elemen komunikasi kebijakan pada proses migrasi televisi analog ke digital di provinsi lampung. Tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan seperti kurangnya dalam menentukan sikap sebagai pelaksana dari kebijakan ini, kurangnya komunikasi yang merata hingga ke berbagai wilayah-wilayah kabupaten di provinsi lampung, penjelasan seputar birokrasi kepada para elemen yang terkait dalam pelaksana migrasi televisi digital. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi balai monitoring dan frekuensi yang menjadi wakil kementerian komunikasi di daerah khususnya provinsi lampung maupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya bahwa komunikasi kebijakan yang dapat menghasilkan kejelasan informasi merupakan aktivitas yang penting, sehingga mampu menjawab segala kekurangan-kekurangan secara komunikasi dan juga dari kegiatan yang telah dilakukan dalam proses persiapan migrasi televisi digital ini sehingga meminimalisir kekurangan untuk menuntaskan digital televisi di indonesia. Terbatasnya kegiatan komunikasi langsung untuk dapat memberikan putusan bahwa kejelasan migrasi televisi digital ini akan ditunda atau terus dilaksanakan juga belum memberikan hasil yang sebenarnya, hal ini diakibatkan oleh minimnya anggaran dan singkatnya waktu dalam implementasi yang diberikan dalam kurun waktu 2 tahun, seharusnya penerapan sebuah kebijakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan waktu yang tepat atau tidak terlalu singkat disertai anggaran yang memadai, sehingga

masyarakat dapat menerima informasi secara bertahap dengan baik dan meminimalisir adanya kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

5.1.2 Saran Secara Akademik

Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya tidak memiliki ukuran yang pasti terkait dengan benar atau salah, hal itu karena tergantung pada nilai, etika dan moral yang dianut oleh peneliti. Peneliti menyarankan bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian kualitatif untuk lebih detail dalam memperhatikan teknik pengumpulan data terutama observasi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan bahwa observasi merupakan kekuatan dalam mengkonfirmasi kembali apa yang dikatakan oleh informan hal ini tetap dilakukan meski secara singkat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi pemikiran pembaca yang hendak melakukan penelitian yang serupa atau lebih lanjut sehingga dapat memperbaiki berbagai kekurangan pada penelitian ini yang berkenaan dengan komunikasi kebijakan dalam implementasi migrasi televisi analog menuju digital di provinsi Lampung..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab solichin. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, BumiAksara.
- Abdul Wahab, Solichin (2005), Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara
- Abdullah. 2010. Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek. Malang: UMM Press.
- Abrar, A. N. (2004). Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi. Populasi, 15(1), 17- 32.
- Abrar, A. N. (2008). Kebijakan Media Interaktif:Belum Melancarkan Sistem KomunikasiIndonesia. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 5(1), 85–98
- Adyanata Lubis. (2016), Basis Data Dasar. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agusta, I. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Jurnal StudiKomunikasi Dan Media
- Arifin, Anwar, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Jakarta, RajawaliPers, 2002.

- Badruddin S. 2009. Pengertian Pembangunan. <http://prof-syamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> [13]
- Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi, Surabaya: Insan Cendekia.
- Berger Peter dan Luckman, Thomas. 1990 "Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan". LP3ES, Jakarta.
- Bertens, K, 1999. "Sejarah Filsafat Yunani", Yogyakarta: Kanisius.
- Cook Hunsake, 2001. Management and Organizational, PT GramediaPustaka, Jakarta
- Dedy N. Hidayat, Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik, (Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003).
- Dedy N. Hidayat. 2003. Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik, Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Dwijo Wijoto RN. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. (Depok: LPSP3, 2007). Dunn W. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta :UGM Press.
- Evi Novianti (2019). Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya. Penerbit; ANDI(Anggota IKAPI).
- Evi Novianti (2019). Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya. Penerbit; ANDI(Anggota IKAPI).

- H. Hadari Nawawi, 2003; Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. oktober 2009.
- Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media.
- Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Liliweri, Alo. 2004. Wacana Komunikasi Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan, M.A.; Wardhani, Andy Corry; Hamid, Farid. 2010. Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, D. 2014, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, R.D.. 2009, Reinventing Pembangunan, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Nasution Z. 2004. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurani, Soyomukti. 2016. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia
- Pace, R. Wyne Dan Faules, Don F. 2001. Komunikasi Organisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : BalaiPustaka.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang :Intrans Publishing.

- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap*.
Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS.
- Sztompka P. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Wahab SA. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarno,B. 2016, *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Komparatif*, Yogyakarta :Center of Academic Publishing Service.
- Winarno.2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press

WEBSITE

- <https://Siarandigital.Kominfo.Go.Id/Berita/Ayo-Lampung-Mulai-Beralih-Ke-Siaran-Tv-Digital>.
- <http://Www.Kpi.Go.Id/Index.Php/Id/Umum/38-Dalam-Negeri/36015-Pelantikan-Kpid-Lampung-Kpi-Ajak-Sosialisasi-Siaran-Digital-Lebih-Masif-Ke-Masyarakat>
- <https://Diskominfotik.Riau.Go.Id/2021/03/10/Seleksi-Penyelenggara-Multipleksing-Siaran-Televisi-Digital-Terrestrial-Tahun-2021/www.Kominfo.Go.Id>
- <https://www.unpad.ac.id/profil/dr-antar-venus-ma-comm-kata-kata-itu-memiliki-kekuatan-luar-biasa/>
- www.kompas.com

JURNAL

Digital Dividend Pada Migrasi TV Analog Ke TV Digital – Prospek Dan Dilema, Mudrik Alaydrus Manajemen Telekomunikasi, Universitas Mercu Buana.

Fajar Setyaning Dwi Putra, 2017 Partisipasi Warga Negara Di Media Sosial Dalam Mendukung Program Bandung Smart City Universitas Pendidikan Indonesia.

Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian Set Top Box (Stb) Kepada Masyarakat Tidak Mampu April Laksana¹ , Achmad Nashrudin² , Riska Ferdiana³ ^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa Email: Riskalaksana87@Gmail.Com.

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Hafis Aldani Posangi Florence D. J. Lengkong SalminDengo.

Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Kampung Tematik Di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang 1 Reina Hapsari Ayuningtyas, Amni Zarkasyi Rahman 2

Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital: Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi Revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran Frendy Christianto Imanuel Siahaan 1), Guntur F. Prisanto 2), Niken F. Ernungtyas 3), Irwansyah 4), Syahrul Hidayanto

Model Komunikasi Pemerintah Untuk Kebijakan Akselerasi Peningkatan Status Pasar Tradisional -Modernisasi Chayataindan Saudah Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang.

Problem Migrasi Siaran Tv Analog Ke Digital Redi Panuju Universitas Dr Soetomo Surabaya Indonesia (E-Mail: Redi.Panuju@Unitomo.Ac.Id).

Rabi'atul Adaniah Wahab , “Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal Di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital The Migration Of Transmitter System Infrastructure Of Local Television Station In North Sulawesi Towards Migration Of Digital Television Broadcasting System”.

Sikap Masyarakat Terhadap Kampanye Televisi Digital Pada Media Televisi Public Attitudes Toward The Digital Television Campaign On Television Media Syarif Budhirianto Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung Indonesia.